

ANALISIS EFEKTIVITAS INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEGAGALAN PASAR MELALUI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DI INDONESIA

Khairani Alawiyah Matondang¹, Enjelika Simamora², Eva Ulina Br Hombing³, Yosua Simanjuntak⁴

Universitas Negeri Medan

e-mail: alawiyah@unimed.ac.id¹, angelsimamora07@gmail.com², evaulina855@gmail.com³, josuabntang@gmail.com⁴

Abstrak – Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu menyediakan barang dan jasa secara efisien, khususnya pada konteks penyiaran publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas intervensi pemerintah melalui Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI dan RRI dalam mengatasi distorsi pasar media. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah data sekunder berupa regulasi, laporan lembaga penyiaran, literatur akademik, serta analisis konten program siaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui LPP cukup efektif dalam menyediakan konten edukatif, budaya, dan layanan publik yang tidak dipenuhi oleh media swasta. LPP juga berperan memperluas akses informasi ke daerah terpencil dan menjaga keberagaman konten. Namun, efektivitas intervensi masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, rendahnya popularitas dibandingkan media komersial, serta tantangan independensi politik. Selain itu, era digitalisasi mempertegas urgensi transformasi LPP agar tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi media masyarakat. Oleh karena itu, reformasi pendanaan, penguatan independensi, serta inovasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dalam sektor penyiaran publik di Indonesia.

Kata Kunci: Kegagalan Pasar, Intervensi Pemerintah, Lembaga Penyiaran Publik, TVRI, RRI.

Abstract – Market failure occurs when market mechanisms are unable to provide goods and services efficiently, particularly in the context of public broadcasting in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of government intervention through Public Broadcasting Institutions (LPP), such as TVRI and RRI, in addressing distortions within the media market. Using a descriptive qualitative approach, the research examines secondary data including regulations, institutional reports, academic literature, and program content analysis. The findings reveal that government intervention through LPP is relatively effective in delivering educational, cultural, and public service content that is often neglected by commercial media. LPP also plays a role in expanding access to information in remote areas and ensuring content diversity. However, its effectiveness is still limited by budget constraints, low audience ratings compared to commercial broadcasters, and challenges to political independence. Moreover, the digitalization era emphasizes the urgency for LPP transformation to remain relevant amidst shifting media consumption patterns. Therefore, reforms in funding, strengthening institutional independence, and fostering digital innovation are essential to enhance the effectiveness of government intervention in Indonesia's public broadcasting sector.

Keywords: *Market Failure, Government Intervention, Public Broadcasting Institution, TVRI, RRI.*

PENDAHULUAN

Kegagalan pasar adalah situasi di mana pasar bebas gagal dalam menyediakan barang dan jasa secara efisien, sehingga menyebabkan ketidakoptimalan dalam distribusi sumber daya dan kesejahteraan ekonomi. Kegagalan pasar seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, seperti eksternalitas, barang publik, asimetri informasi, dan monopoli. Peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi kegagalan pasar tersebut untuk memastikan keberhasilan pasar dan kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga faktor penting yang berkontribusi terhadap kegagalan pasar, yaitu inefisiensi, eksternalitas negatif, dan barang publik. Pertama ada Inefisiensi yaitu terjadi ketika sumber

daya tidak dialokasikan dengan cara yang paling produktif atau optimal. Dalam pasar yang efisien, harga barang dan jasa mencerminkan biaya marginal dan manfaat marginal mereka, memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Namun, berbagai faktor seperti monopoli, oligopoli, dan informasi asimetris dapat menyebabkan inefisiensi. Misalnya, dalam pasar monopoli, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya marginal, mengurangi jumlah yang diproduksi dan dikonsumsi dibandingkan dengan pasar kompetitif.

Yang kedua ada Eksternalitas terjadi ketika aktivitas ekonomi mempengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Eksternalitas dapat bersifat positif atau negatif. Eksternalitas negatif, seperti polusi, terjadi ketika biaya dari aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku ekonomi, tetapi oleh masyarakat secara umum. Sebaliknya, eksternalitas positif, seperti vaksinasi, memberikan manfaat kepada orang lain di luar individu yang terlibat dalam transaksi. Tanpa intervensi, pasar cenderung gagal memperhitungkan eksternalitas ini, yang mengarah pada overproduksi atau underproduksi barang dan jasa.

Dan yang terakhir yaitu Barang publik adalah barang yang non-rival dan non-eksklusif, yang berarti konsumsi satu individu tidak mengurangi ketersediaan untuk orang lain, dan tidak mungkin untuk mengecualikan individu dari mengkonsumsi barang tersebut. Contoh barang publik termasuk pertahanan nasional, lampu jalan, dan udara bersih. Karena sifatnya yang noneksklusif dan non-rival, pasar cenderung gagal menyediakan barang publik dalam jumlah yang memadai. Hal ini disebabkan oleh masalah "free rider", di mana individu memiliki insentif untuk tidak membayar untuk barang publik, berharap bahwa orang lain akan menanggung biayanya, yang akhirnya mengarah pada underprovision barang publik.

Dalam beberapa kondisi, pemerintah harus terlibat untuk memperbaiki kegagalan pasar agar efisiensi dan keadilan dapat tercapai. Pemerintah dapat melakukan intervensi melalui berbagai cara seperti regulasi, subsidi, pajak, dan kebijakan lainnya untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi dalam sektor penyiaran melalui lembaga penyiaran publik untuk mengatasi kegagalan pasar. Lembaga penyiaran publik memiliki tujuan untuk menyediakan informasi dan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, efektivitas intervensi pemerintah melalui lembaga penyiaran publik dalam mengatasi kegagalan pasar masih perlu dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas intervensi pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar melalui lembaga penyiaran publik di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan intervensi pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar melalui lembaga penyiaran publik. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan intervensi pemerintah di masa depan.

KAJIAN TEORI

Kegagalan Pasar (Market Failure Theory)

Teori Kegagalan Pasar (Market Failure Theory) menyatakan bahwa mekanisme pasar tidak selalu efisien dalam menyediakan barang dan jasa publik. Menurut Joseph E. Stiglitz (1989), kegagalan pasar muncul akibat eksternalitas, informasi asimetris, monopoli, dan ketidakmampuan pasar menyediakan public goods sehingga memerlukan intervensi pemerintah.

Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi Publik

Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi Publik dilakukan ketika mekanisme pasar gagal memenuhi kepentingan masyarakat. Menurut Samuelson (1954), pemerintah wajib

menyediakan public goods seperti pendidikan dan informasi karena pasar tidak efisien. Sementara Musgrave (1959) menekankan tiga fungsi pemerintah: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks penyiaran publik, intervensi pemerintah melalui TVRI dan RRI bertujuan menjamin akses informasi merata, netral, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Media dan Lembaga Penyiaran Publik

Media dan Lembaga Penyiaran Publik berfungsi menyediakan informasi yang netral, edukatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurut McQuail (2010), penyiaran publik harus melayani kepentingan umum melalui prinsip universalitas, independensi, dan keberagaman. TVRI dan RRI di Indonesia menjadi representasi lembaga penyiaran publik yang berperan menjaga demokrasi, memperkuat identitas budaya, serta mengatasi kegagalan pasar dalam distribusi informasi dan layanan sosial.

Teori Tanggung Jawab Sosial Media (Social Responsibility Theory of the Press)

Media memiliki tanggung jawab sosial untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga melayani kepentingan publik (De Fretes, M., & Kaligis, R., 2018). Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kebebasan pers absolut yang sering mengabaikan kebutuhan masyarakat luas. Dalam konteks penyiaran publik, teori ini menekankan bahwa media harus menyediakan informasi yang akurat, berimbang, edukatif, dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI dan RRI merepresentasikan praktik dari teori ini, yaitu menghadirkan layanan informasi yang tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pasar, melainkan oleh tanggung jawab sosial untuk menjamin pemerataan akses informasi, menjaga keberagaman budaya, serta memperkuat demokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis peran dan efektivitas intervensi pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar melalui Lembaga Penyiaran Publik (LPP), bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan memahami fenomena secara mendalam.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data sekunder: diperoleh dari dokumen resmi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah, laporan tahunan TVRI/RRI), artikel jurnal, buku, berita, serta publikasi dari lembaga riset terkait penyiaran publik.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan meliputi:

1. Observasi tidak langsung, melalui analisis konten siaran LPP, khususnya pada program program edukasi, kebudayaan, dan layanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intervensi pemerintah melalui lembaga penyiaran publik (LPP) di Indonesia merupakan langkah penting dalam mengatasi kegagalan pasar di sektor media. Pasar penyiaran yang didominasi oleh logika komersial terbukti tidak mampu menyediakan konten yang berimbang antara hiburan, informasi, pendidikan, dan pelestarian budaya. Oleh karena itu, pemerintah melalui TVRI dan RRI berperan sebagai penyedia layanan publik yang netral, inklusif, dan edukatif. Namun demikian, efektivitas intervensi tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan dan tantangan struktural.

Secara teoretis, keberadaan LPP adalah bentuk public intervention yang dibuat untuk mengisi ruang kosong yang tidak dapat dipenuhi mekanisme pasar. TV swasta, misalnya, lebih memilih menyiarakan sinetron, acara reality show, dan konten hiburan karena mendatangkan iklan. Hal ini menimbulkan market distortion berupa kurangnya program edukatif, kebudayaan, dan penyiaran yang menyuarakan kepentingan kelompok minoritas. LPP berfungsi mengoreksi distorsi ini dengan menyediakan program pendidikan jarak jauh, siaran kebudayaan lokal, hingga program literasi informasi (McQuail, 2010). Dengan demikian, intervensi pemerintah melalui LPP dapat dikatakan efektif dalam memastikan adanya diversifikasi konten yang bermanfaat secara sosial meskipun tidak menguntungkan secara komersial.

Salah satu kegagalan pasar dalam penyiaran adalah tidak meratanya akses informasi. Media swasta cenderung beroperasi di daerah perkotaan dan wilayah yang memiliki potensi pasar iklan, sementara masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) kurang mendapatkan layanan informasi. Dalam konteks ini, TVRI dan RRI menjadi jembatan komunikasi nasional yang memperluas akses informasi ke pelosok negeri. Menurut Nugroho (2012), keberadaan LPP berkontribusi dalam membangun identitas kebangsaan serta memperkuat integrasi sosial melalui penyiaran yang menjangkau daerah terpencil. Akan tetapi, kendala infrastruktur dan keterbatasan teknologi siaran digital membuat pemerataan akses ini masih belum sepenuhnya tercapai.

Kegagalan pasar juga tampak pada rendahnya netralitas media swasta akibat kepemilikan yang terkonsentrasi. Banyak stasiun televisi besar di Indonesia dimiliki oleh konglomerasi bisnis yang sekaligus berafiliasi dengan partai politik, sehingga pemberitaan sering bias. LPP, idealnya, hadir untuk menjamin netralitas informasi dan keberimbangan berita. Namun, dalam praktiknya, independensi LPP sering diragukan. Studi Nugroho, Putri, dan Laksmi (2012) menegaskan bahwa TVRI masih rentan terhadap intervensi politik, baik dalam penyusunan konten berita maupun dalam pemilihan pimpinan lembaga. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas intervensi pemerintah karena lembaga yang seharusnya netral justru bisa terjebak dalam kepentingan politik tertentu.

Permasalahan klasik yang dihadapi LPP adalah keterbatasan anggaran. Hingga kini, sebagian besar dana operasional LPP bersumber dari APBN. Dana tersebut sering kali tidak mencukupi untuk mendukung produksi program berkualitas, investasi teknologi, serta ekspansi siaran digital. Sebaliknya, media swasta memiliki dukungan finansial besar dari iklan, sehingga mampu menghasilkan konten dengan kualitas produksi tinggi. Ketimpangan ini menyebabkan LPP kalah bersaing dalam hal popularitas di mata masyarakat. Bahkan, survei menunjukkan bahwa tingkat keterpirsaan TVRI jauh tertinggal dibandingkan televisi swasta (Sudibyo, 2019). Oleh karena itu, efektivitas intervensi pemerintah akan sulit tercapai tanpa adanya reformasi model pembiayaan LPP, misalnya melalui kombinasi license fee publik, subsidi pemerintah, serta kerja sama non-komersial.

Selain itu, era digitalisasi media semakin mempertegas kelemahan LPP. Generasi muda lebih banyak mengakses informasi dan hiburan melalui platform digital seperti YouTube, Netflix, dan TikTok. Jika tidak beradaptasi, LPP berisiko kehilangan relevansi. Meski TVRI telah meluncurkan layanan streaming, upaya ini masih terbatas dalam hal konten, kualitas, dan promosi. Transformasi digital seharusnya menjadi prioritas, termasuk pemanfaatan media sosial, layanan on-demand, serta integrasi multiplatform untuk memperluas jangkauan. Tanpa langkah strategis, LPP akan semakin tertinggal dan intervensi pemerintah tidak lagi efektif menghadapi disrupti media.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah melalui Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Indonesia merupakan langkah strategis dalam mengatasi kegagalan pasar di sektor penyiaran. LPP berperan penting dalam menyediakan konten edukatif, budaya, dan layanan publik yang sering diabaikan media swasta, sekaligus memperluas akses informasi hingga ke daerah terpencil. Namun, efektivitas intervensi ini masih terbatas oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya daya saing dibanding media komersial, serta ancaman intervensi politik yang mengurangi independensi lembaga.

Selain itu, tantangan digitalisasi menuntut LPP melakukan transformasi agar tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi media masyarakat. Dengan memperkuat kelembagaan, memperbaiki sistem pendanaan, serta mendorong inovasi digital, LPP dapat lebih efektif menjalankan fungsi publiknya dan menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjamin pemerataan akses informasi serta menjaga keberagaman budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- De Fretes, M., & Kaligis, R. A. W. (2018). Implementasi teori pers tanggung jawab sosial dalam Fatmawati. (2021, oktober 2). Kegagalan Pasar dan Campur Tangan Pemerintah. (Fatmawati, Ed.) al-mujadid humaniora, Volume 7, Nomor 2.
- Febriana, H. (2024, Juni 27). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kegagalan Pasar. admin. (2024, JULY 31). Kegagalan Pasar dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kegagalan tersebut.
- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia. Jakarta: CIPG.
- pemberitaan TVRI Pusat. CoverAge: Journal of Strategic Communication, 9(1), 26-34.
- Sudibyo, A. (2019). Ekonomi Politik Media di Indonesia. Jakarta: Kompas.